

Menyiapkan Indonesia untuk Ekonomi Masa Depan

Antara Keterbukaan dan Kedaulatan

Oleh: Rudy C Tarumingkeng



1. Apa Isu Utamanya?

Indonesia perlu tetap terbuka terhadap perdagangan, investasi, teknologi, dan pasar global, namun sekaligus menjaga kedaulatan pangan, energi, industri, data, dan sumber daya strategis.

Keterbukaan

- Perdagangan & ekspor
- Investasi & modal
- Teknologi & inovasi
- Akses pasar global



Tujuan:
Keterbukaan
Berdaulat

Kedaulatan

- Pangan & energi
- Industri nasional
- Data & AI
- SDA untuk rakyat

2. Mengapa Ini Penting?



Pertumbuhan
Indonesia:
4,7% (2026)
5,0% (2027)
Proyeksi OECD



Ekspor
Jan-Apr 2026:
US\$92,15
miliar



Impor
Jan-Apr 2026:
US\$86,51
miliar



Surplus
perdagangan:
US\$5,64
miliar



Indonesia memiliki pasar domestik besar, anggota G20, kekuatan utama ASEAN, dan posisi strategis Indo-Pasifik.

3. Peluang Ekonomi Masa Depan



A. Hilirisasi & nilai tambah
nikel, sawit,
pangan, perikanan



B. ASEAN & rantai pasok baru
relokasi investasi,
integrasi kawasan



C. Ekonomi digital & AI
produktivitas, layanan
publik, inovasi



D. Transisi energi
panas bumi, surya,
kendaraan listrik



E. Pasar domestik besar
konsumsi, kelas menengah,
skala ekonomi



F. Maritim & logistik
pelabuhan, konektivitas,
perdagangan

4. Risiko dan Tantangan



1. Fragmentasi geopolitik & proteksionisme



2. Ketergantungan pada komoditas primer



3. Kesenjangan digital & kualitas SDM



4. Ketimpangan wilayah & informalitas kerja



5. Tekanan pangan, energi, dan iklim



6. Standar global makin ketat (ESG, traceability, EUDR)



5. Pilar Strategi Indonesia



1. Keterbukaan Strategis terbuka, tetapi selektif



2. Industrialisasi Bernilai Tambah dari bahan mentah ke produk bernilai tinggi



3. SDM Adaptif pendidikan, vokasi, reskilling, literasi digital

**Ekonomi
Masa Depan
Indonesia**



4. Digitalisasi Inklusif internet merata, UMKM digital, AI untuk publik



5. Ketahanan Pangan & Energi pasokan stabil dan transisi hijau



6. Tata Kelola Demokratis kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas

6. Agenda Kebijakan Prioritas

- Perkuat hilirisasi berbasis transfer teknologi
- Tingkatkan kualitas pendidikan, vokasi, dan riset
- Dorong UMKM naik kelas ke rantai nilai nasional dan global
- Bangun infrastruktur fisik dan digital yang merata
- Percepat energi terbarukan dan reformasi subsidi yang tepat sasaran
- Perkuat diplomasi ekonomi dan daya saing Indonesia di ASEAN & Indo-Pasifik

7. Siapa yang Harus Mendapat Manfaat?

Ekonomi masa depan harus inklusif: manfaat pertumbuhan harus dirasakan luas, bukan hanya oleh sektor besar dan elite ekonomi.



Petani



Nelayan & masyarakat pesisir



Pekerja



Perempuan



Generasi muda



UMKM



Daerah tertinggal & Indonesia Timur



KESIMPULAN

Indonesia dapat menjadi kekuatan ekonomi masa depan bila mampu memadukan keterbukaan, kedaulatan, produktivitas, inklusi, dan keberlanjutan. Tantangannya bukan memilih salah satu, tetapi membangun keterbukaan yang berdaulat dan berpihak pada kemakmuran rakyat.



Rudy C Tarumingkeng: Menyiapkan Indonesia untuk Ekonomi Masa Depan - Antara Keterbukaan dan Kedaulatan

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

24 Juni 2026

MENYIAPKAN INDONESIA UNTUK EKONOMI MASA DEPAN: ANTARA KETERBUKAAN DAN KEDAULATAN

Abstrak

Indonesia sedang memasuki fase pembangunan ekonomi yang semakin kompleks. Dunia tidak lagi bergerak dalam pola globalisasi lama yang terutama ditandai oleh liberalisasi perdagangan, perluasan investasi asing, integrasi rantai pasok, dan efisiensi biaya. Kini dunia memasuki fase **globalisasi baru**, yaitu globalisasi yang lebih politis, lebih digital, lebih hijau, lebih terfragmentasi, dan lebih sarat pertarungan teknologi. Dalam situasi ini, Indonesia menghadapi pertanyaan strategis: bagaimana tetap terbuka terhadap perdagangan, investasi, ilmu pengetahuan, teknologi, modal, dan kerja sama internasional, tetapi pada saat yang sama menjaga kedaulatan ekonomi, kemandirian kebijakan, ketahanan pangan, ketahanan energi, penguasaan data, perlindungan sumber daya alam, serta kesejahteraan rakyat?

Artikel ini membahas secara naratif dan komprehensif posisi Indonesia dalam ekonomi masa depan dengan menempatkan ketegangan antara **keterbukaan** dan **kedaulatan** sebagai poros analisis. Keterbukaan dibutuhkan karena Indonesia tidak dapat membangun ekonomi modern secara tertutup. Indonesia membutuhkan investasi, teknologi, akses pasar, pembelajaran global, kerja sama industri, dan integrasi dengan rantai nilai internasional. Namun keterbukaan yang tidak selektif dapat membuat

Indonesia terjebak sebagai pemasok bahan mentah, pasar konsumsi, tempat relokasi industri rendah nilai tambah, atau sekadar pengguna teknologi asing. Sebaliknya, kedaulatan ekonomi diperlukan agar Indonesia mampu menentukan arah pembangunan nasional, melindungi kepentingan rakyat, memperkuat industri domestik, dan menjaga ruang kebijakan. Tetapi kedaulatan yang dipahami secara sempit sebagai penutupan diri dapat menghambat inovasi, menurunkan produktivitas, dan menjauhkan Indonesia dari dinamika kemajuan dunia.

Data mutakhir menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki fondasi pertumbuhan yang relatif kuat, tetapi menghadapi tekanan eksternal dan domestik. OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7% pada 2026 dan 5,0% pada 2027, dengan risiko dari biaya energi, ketidakpastian kebijakan, pelemahan pasar tenaga kerja, serta melemahnya permintaan global atas sebagian komoditas utama Indonesia. ([OECD](#)) IMF memproyeksikan pertumbuhan riil Indonesia 5,0% dan inflasi 3,0% pada 2026, dengan populasi sekitar 287,2 juta jiwa. ([IMF](#)) Di sisi perdagangan, BPS mencatat ekspor Indonesia Januari–April 2026 sebesar US\$92,15 miliar, impor US\$86,51 miliar, dan surplus perdagangan US\$5,64 miliar. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Sementara itu, ASEAN tetap menjadi kawasan penting karena FDI ke ASEAN pada 2024 meningkat 8% menjadi US\$226 miliar meskipun aliran FDI global turun 11%. ([ASEAN Main Portal](#))

Artikel ini berargumen bahwa strategi ekonomi masa depan Indonesia harus berbentuk **keterbukaan berdaulat**: terbuka terhadap dunia, tetapi tidak pasif; menerima investasi, tetapi menuntut transfer teknologi; mendorong ekspor, tetapi tidak berhenti pada bahan mentah; mengembangkan digitalisasi dan AI, tetapi menjaga kedaulatan data; mengikuti standar global, tetapi memperjuangkan keadilan bagi petani, UMKM, dan negara berkembang; memperkuat negara, tetapi tetap transparan dan akuntabel. Indonesia memerlukan ekonomi yang tidak

hanya tumbuh, tetapi juga tangguh, inklusif, produktif, hijau, dan bermartabat.

Kata kunci: *ekonomi masa depan, Indonesia, keterbukaan, kedaulatan ekonomi, globalisasi baru, hilirisasi, ketahanan nasional, rantai pasok global, AI, digitalisasi, transisi energi, UMKM, pembangunan inklusif.*

1. Pendahuluan

Indonesia berdiri di tengah perubahan besar ekonomi dunia. Perubahan itu tidak bersifat sementara, melainkan struktural. Tataan ekonomi global yang selama beberapa dekade dibangun di atas asumsi perdagangan bebas, rantai pasok global yang efisien, mobilitas modal, dan integrasi pasar kini mengalami tekanan. Negara-negara besar kembali menggunakan kebijakan industri, subsidi strategis, pembatasan teknologi, kontrol ekspor, dan standar lingkungan sebagai instrumen kekuasaan ekonomi. Perusahaan global tidak lagi hanya mencari lokasi produksi paling murah, tetapi juga mencari lokasi produksi yang aman, stabil, dekat dengan pasar, memenuhi standar lingkungan, dan tidak terlalu rentan terhadap konflik geopolitik.

Bagi Indonesia, perubahan ini menuntut cara berpikir baru. Indonesia tidak dapat sekadar mengulangi resep lama: membuka pasar, menarik investasi, mengekspor komoditas, dan berharap pertumbuhan akan otomatis menetes ke bawah. Ekonomi masa depan membutuhkan kapasitas negara untuk memilih sektor strategis, membangun industri bernilai tambah, meningkatkan kualitas manusia, memperkuat teknologi, menjaga stabilitas makroekonomi, dan memastikan distribusi manfaat pembangunan secara adil.

Namun Indonesia juga tidak dapat menutup diri. Sejarah menunjukkan bahwa negara yang berhasil naik kelas bukanlah negara yang sepenuhnya tertutup, melainkan negara yang mampu belajar dari dunia, menyerap teknologi, membangun institusi, memperkuat industri domestik, dan bernegosiasi secara cerdas dengan modal internasional. Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Singapura, Taiwan, dan beberapa negara Eropa menunjukkan bahwa keterbukaan dapat menjadi sumber kemajuan bila disertai kapasitas domestik yang kuat. Sebaliknya, keterbukaan tanpa strategi dapat membuat negara berkembang terperangkap dalam ketergantungan.

Di sinilah muncul tema utama artikel ini: **antara keterbukaan dan kedaulatan**. Keduanya sering dipahami sebagai dua kutub yang saling bertentangan. Keterbukaan dianggap berarti menerima pasar global, investasi asing, dan liberalisasi. Kedaulatan dianggap berarti proteksi, kontrol negara, dan pembatasan terhadap pengaruh asing. Namun dikotomi semacam ini terlalu sederhana. Dalam ekonomi masa depan, Indonesia membutuhkan keduanya sekaligus: keterbukaan yang selektif dan kedaulatan yang adaptif.

Keterbukaan tanpa kedaulatan dapat membuat Indonesia menjadi pasar besar tanpa industri kuat, produsen bahan mentah tanpa teknologi, pengguna platform digital tanpa penguasaan data, dan penerima investasi tanpa kemampuan tawar. Sebaliknya, kedaulatan tanpa keterbukaan dapat membuat Indonesia tertinggal dalam inovasi, teknologi, produktivitas, dan pasar global. Maka, yang diperlukan bukan memilih salah satu, melainkan membangun sintesis: **keterbukaan berdaulat**.

Keterbukaan berdaulat berarti Indonesia tetap terhubung dengan dunia, tetapi tidak kehilangan arah nasional. Indonesia menerima investasi, tetapi menuntut nilai tambah domestik. Indonesia masuk ke rantai nilai global, tetapi berusaha naik kelas. Indonesia mengadopsi teknologi, tetapi membangun talenta dan kapasitas riset sendiri. Indonesia mengikuti standar lingkungan global, tetapi memperjuangkan keadilan bagi petani

kecil dan pelaku usaha kecil. Indonesia memperkuat negara, tetapi tetap menjaga demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas.

2. Globalisasi Baru dan Perubahan Medan Ekonomi Dunia

Globalisasi lama dapat digambarkan sebagai globalisasi efisiensi. Logikanya sederhana: produksi ditempatkan di lokasi yang paling murah, pasokan bahan baku dicari dari negara yang paling kompetitif, dan barang bergerak melalui rantai pasok panjang untuk melayani pasar dunia. Dalam model ini, perusahaan multinasional memecah proses produksi ke berbagai negara. Desain dapat dilakukan di satu negara, komponen diproduksi di negara lain, perakitan dilakukan di kawasan berupah murah, dan pemasaran berlangsung secara global.

Model ini menghasilkan pertumbuhan besar, terutama di Asia. Namun globalisasi lama juga menghasilkan kerentanan. Pandemi, perang dagang, konflik geopolitik, krisis energi, dan gangguan logistik menunjukkan bahwa efisiensi berlebihan dapat mengurangi ketahanan. Sistem yang terlalu bergantung pada satu pemasok, satu negara, satu jalur pelayaran, atau satu teknologi menjadi rapuh ketika terjadi guncangan.

Globalisasi baru muncul sebagai koreksi terhadap globalisasi lama. Dalam globalisasi baru, negara dan perusahaan mulai menyeimbangkan efisiensi dengan keamanan. Rantai pasok tidak lagi hanya mempertimbangkan biaya, tetapi juga risiko politik, keamanan energi, ketahanan pangan, keamanan data, dan standar lingkungan. Istilah seperti *de-risking*, *friend-shoring*, *near-shoring*, dan *reshoring* menjadi bagian dari bahasa ekonomi global.

WTO dalam laporan perdagangan global 2026 mencatat bahwa pertumbuhan perdagangan barang dunia menghadapi ketidakpastian, dengan skenario pertumbuhan yang dapat berubah tergantung konflik, belanja terkait AI, dan dinamika permintaan global. ([World Trade Organization](#)) Artinya, perdagangan dunia tetap berjalan, tetapi semakin

rentan terhadap faktor politik, teknologi, dan keamanan. Dunia tidak berhenti berdagang, tetapi perdagangan semakin tidak netral.

Dalam konteks ini, negara-negara yang terlalu bergantung pada ekspor komoditas primer akan menghadapi risiko besar. Harga komoditas berfluktuasi, standar lingkungan makin ketat, dan permintaan global dapat berubah cepat. Negara-negara yang hanya menjadi pasar konsumsi juga akan tertinggal karena nilai tambah terbesar berada pada desain, teknologi, data, merek, logistik, dan layanan purna jual.

Indonesia harus membaca perubahan ini dengan tajam. Indonesia tidak boleh hanya bertanya: "Apa yang bisa kita ekspor?" Pertanyaan yang lebih penting adalah: "Di bagian mana Indonesia berada dalam rantai nilai global?" Apakah Indonesia hanya mengekspor nikel, sawit, batu bara, gas, kopi, karet, dan ikan? Ataukah Indonesia mampu mengembangkan industri baterai, kendaraan listrik, oleokimia, pangan olahan, bioteknologi laut, energi hijau, perangkat digital, dan layanan berbasis AI?

3. Makna Keterbukaan bagi Indonesia

Keterbukaan ekonomi bukanlah tujuan pada dirinya sendiri. Keterbukaan adalah sarana untuk meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, memperoleh teknologi, menarik investasi, memperbaiki kualitas institusi, dan mempercepat pembelajaran. Negara berkembang membutuhkan keterbukaan karena tidak semua sumber daya, teknologi, modal, dan pengetahuan tersedia di dalam negeri.

Bagi Indonesia, keterbukaan memiliki beberapa manfaat strategis.

Pertama, keterbukaan memberi akses pasar. Indonesia membutuhkan pasar global untuk menyerap produk ekspor, terutama produk bernilai tambah. Dengan pasar domestik saja, banyak industri tidak akan mencapai skala ekonomi yang cukup. Ekspor memaksa perusahaan meningkatkan kualitas, efisiensi, dan standar produksi.

Kedua, keterbukaan memberi akses teknologi. Banyak teknologi maju berasal dari kerja sama internasional, investasi asing, lisensi, kemitraan riset, dan jaringan produksi global. Negara yang menutup diri akan sulit mengejar perkembangan teknologi.

Ketiga, keterbukaan memberi akses modal. Pembangunan infrastruktur, energi, industri, pendidikan, kesehatan, dan digitalisasi membutuhkan pembiayaan besar. APBN dan tabungan domestik tidak selalu cukup. Investasi asing langsung dapat menjadi sumber modal produktif bila diarahkan secara strategis.

Keempat, keterbukaan memperluas pembelajaran kelembagaan. Standar global dalam manajemen, tata kelola perusahaan, lingkungan, keamanan pangan, perlindungan data, dan akuntansi dapat membantu memperbaiki praktik domestik.

Namun keterbukaan juga mengandung risiko. Bila tidak dikelola, keterbukaan dapat menghasilkan deindustrialisasi prematur, ketergantungan impor, penguasaan pasar oleh platform asing, eksploitasi sumber daya alam, dan ketimpangan. Rodrik menjelaskan bahwa banyak negara berkembang mengalami deindustrialisasi lebih awal sebelum mencapai tingkat pendapatan tinggi, sehingga kehilangan mesin produktivitas yang biasanya disediakan sektor manufaktur. DOI: 10.1007/s10887-015-9122-3.

Karena itu, keterbukaan harus bersifat strategis. Indonesia perlu membedakan antara investasi yang membangun kapabilitas dan investasi yang hanya mengeksploitasi pasar. Investasi yang baik membawa teknologi, membuka pekerjaan berkualitas, membangun pemasok lokal, memperluas ekspor, dan menghormati standar lingkungan. Investasi yang buruk hanya mengejar bahan mentah, memanfaatkan insentif, membawa sedikit transfer teknologi, dan meninggalkan beban lingkungan.

4. Makna Kedaulatan Ekonomi

Kedaulatan ekonomi sering disalahpahami sebagai kemampuan menutup diri dari pengaruh luar. Padahal, dalam dunia modern, tidak ada negara besar yang benar-benar mandiri dalam arti absolut. Bahkan negara maju pun bergantung pada perdagangan, energi, mineral, teknologi, dan pasar global. Karena itu, kedaulatan ekonomi tidak berarti autarki. Kedaulatan ekonomi berarti **kemampuan memilih, mengatur, melindungi, dan membangun kapasitas nasional** dalam hubungan dengan dunia.

Kedaulatan ekonomi mencakup beberapa dimensi.

Pertama, kedaulatan sumber daya alam. Indonesia harus memastikan bahwa kekayaan alam tidak hanya diekstraksi dan diekspor, tetapi diolah untuk kemakmuran rakyat. Ini sejalan dengan mandat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan sumber daya alam dalam kerangka sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kedua, kedaulatan pangan. Negara berpenduduk besar tidak boleh terlalu rentan terhadap gejolak harga pangan global. Kedaulatan pangan tidak harus berarti menolak impor sama sekali, tetapi berarti kemampuan menjaga pasokan, harga, gizi, dan produksi strategis.

Ketiga, kedaulatan energi. Transisi energi global membuat energi menjadi isu strategis. Indonesia harus mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor dan mempercepat pengembangan energi terbarukan, termasuk panas bumi, surya, hidro, bioenergi, dan potensi energi laut.

Keempat, kedaulatan industri. Indonesia harus memiliki basis manufaktur dan teknologi yang cukup kuat agar tidak hanya menjadi pasar produk asing.

Kelima, kedaulatan digital. Data, cloud, AI, keamanan siber, dan platform digital kini menjadi infrastruktur kekuasaan ekonomi. Negara yang tidak menguasai tata kelola data akan rentan terhadap dominasi platform global.

Keenam, kedaulatan fiskal dan moneter. Negara harus memiliki ruang fiskal dan stabilitas moneter untuk merespons krisis, membiayai pembangunan, dan menjaga kepercayaan pasar.

Kedaulatan ekonomi juga menuntut tata kelola. Tanpa tata kelola yang baik, kedaulatan dapat berubah menjadi proteksi bagi elite, rente, dan oligarki. Kebijakan yang mengatasnamakan kepentingan nasional dapat disalahgunakan untuk melindungi kelompok tertentu. Karena itu, kedaulatan harus dibarengi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

5. Kondisi Ekonomi Indonesia: Daya Tahan dan Kerentanan

Indonesia memiliki daya tahan ekonomi yang tidak dapat diabaikan. Pasar domestik besar, populasi produktif, stabilitas makro relatif terjaga, sumber daya alam beragam, dan posisi geopolitik strategis. IMF memproyeksikan pertumbuhan riil Indonesia 5,0% pada 2026, inflasi 3,0%, dan populasi sekitar 287,2 juta jiwa. ([IMF](#)) Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi salah satu ekonomi besar yang tumbuh relatif stabil.

Namun proyeksi OECD menunjukkan adanya kehati-hatian. OECD memproyeksikan pertumbuhan Indonesia 4,7% pada 2026 dan 5,0% pada 2027, dengan tekanan dari biaya energi, ketidakpastian kebijakan, konsumsi dan investasi yang melemah, serta pasar tenaga kerja yang melunak. ([OECD](#)) Perbedaan proyeksi ini menunjukkan bahwa masa depan ekonomi Indonesia tidak otomatis cerah; ia sangat bergantung pada kualitas kebijakan.

Di sisi perdagangan, BPS mencatat ekspor Indonesia Januari–April 2026 sebesar US\$92,15 miliar, impor sebesar US\$86,51 miliar, dan surplus perdagangan sebesar US\$5,64 miliar. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Surplus ini positif, tetapi struktur perdagangan tetap perlu dicermati. Indonesia masih kuat pada komoditas dan produk berbasis sumber daya

alam. Kekuatan ini perlu diubah menjadi industri bernilai tambah, bukan hanya dipertahankan sebagai ekspor primer.

Sementara itu, ASEAN menjadi ruang strategis. ASEAN Investment Report 2025 mencatat bahwa FDI ke ASEAN pada 2024 meningkat 8% menjadi US\$226 miliar, meskipun FDI global turun 11%; laporan yang sama juga menyoroti supply chain development sebagai tema utama. ([ASEAN Main Portal](#)) Ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk menarik investasi yang sedang mencari basis produksi baru di kawasan. Namun kesempatan ini tidak otomatis masuk ke Indonesia. Negara-negara ASEAN lain juga bersaing melalui reformasi regulasi, infrastruktur, kawasan industri, kualitas tenaga kerja, dan kemudahan usaha.

Indonesia harus jujur terhadap kekuatan dan kelemahannya. Kekuatan Indonesia adalah pasar besar, SDA, posisi strategis, stabilitas politik relatif, dan potensi digital. Kelemahannya adalah kualitas SDM yang belum merata, logistik mahal, birokrasi kompleks, kepastian hukum yang masih menjadi perhatian, ketimpangan wilayah, informalitas tenaga kerja, dan produktivitas yang belum cukup tinggi.

6. Hilirisasi sebagai Jalan Tengah antara Keterbukaan dan Kedaulatan

Hilirisasi adalah salah satu contoh paling jelas bagaimana Indonesia mencoba menyeimbangkan keterbukaan dan kedaulatan. Indonesia tidak menolak investasi asing, tetapi ingin agar investasi asing tidak hanya mengambil bahan mentah. Indonesia tetap masuk ke pasar global, tetapi ingin menjual produk dengan nilai tambah lebih tinggi. Indonesia tetap bekerja sama dengan perusahaan luar negeri, tetapi ingin membangun industri domestik.

Dalam sektor nikel, hilirisasi telah menjadi simbol kebijakan industri Indonesia. Nikel bukan lagi dilihat semata-mata sebagai komoditas tambang, tetapi sebagai pintu masuk ke industri baterai, kendaraan listrik, dan transisi energi. Secara strategis, kebijakan ini tepat karena dunia

membutuhkan mineral kritis untuk energi bersih. IEA menekankan bahwa mineral kritis menjadi bagian penting dari keamanan energi dan transisi energi global. ([IEA](#))

Namun hilirisasi bukan tanpa masalah. Hilirisasi yang hanya berakhir pada pembangunan smelter belum tentu menghasilkan kedaulatan industri. Jika teknologi, pembiayaan, manajemen, dan pasar akhir tetap dikuasai investor asing, maka nilai tambah domestik masih terbatas. Jika energi yang digunakan masih berbasis batu bara, maka produk hilirisasi dapat menghadapi tekanan standar karbon global. Jika masyarakat lokal tidak memperoleh manfaat, maka hilirisasi dapat menimbulkan konflik sosial.

Hilirisasi harus dinaikkan derajatnya menjadi **industrialisasi berbasis pembelajaran teknologi**. Artinya, setiap investasi hilir harus dihubungkan dengan transfer teknologi, pengembangan SDM, riset universitas, pemasok lokal, sertifikasi lingkungan, dan perluasan industri turunan. Indonesia tidak boleh puas menjadi lokasi pengolahan. Indonesia harus menjadi pusat kemampuan produksi, desain, rekayasa, logistik, dan inovasi.

Hilirisasi juga perlu diperluas. Indonesia tidak hanya memiliki nikel. Indonesia memiliki sawit, karet, kakao, kopi, kelapa, rempah, perikanan, rumput laut, kayu legal berkelanjutan, panas bumi, dan keanekaragaman hayati. Hilirisasi pangan, agroindustri, bioekonomi, farmasi alam, kosmetik, material hayati, dan bioteknologi laut dapat menjadi sumber ekonomi masa depan.

7. Kedaulatan Pangan dalam Ekonomi Terbuka

Pangan adalah dimensi kedaulatan yang paling langsung menyentuh kehidupan rakyat. Harga beras, gula, minyak goreng, telur, daging, ikan, dan pangan pokok lainnya memengaruhi inflasi, daya beli, stabilitas sosial, dan kesejahteraan keluarga. Dalam dunia yang semakin rentan terhadap perubahan iklim, konflik geopolitik, dan gangguan logistik, ketahanan pangan menjadi isu strategis.

Kedaulatan pangan bukan berarti semua pangan harus diproduksi sendiri tanpa perdagangan. Indonesia adalah negara kepulauan dengan variasi ekologi dan kebutuhan konsumsi yang besar. Impor dapat diperlukan untuk stabilisasi pasokan. Namun ketergantungan impor yang terlalu besar pada komoditas strategis dapat melemahkan posisi negara. Karena itu, strategi pangan harus menggabungkan produksi domestik, diversifikasi pangan lokal, cadangan strategis, perdagangan yang cerdas, dan perlindungan petani.

Indonesia harus mengubah pendekatan pangan dari sekadar produksi menjadi sistem pangan. Sistem pangan mencakup benih, lahan, air, pupuk, teknologi, penyuluhan, pembiayaan, logistik, pasar, gizi, dan pengurangan kehilangan pascapanen. Banyak persoalan pangan bukan hanya terjadi di sawah atau ladang, tetapi juga di rantai distribusi, tata niaga, infrastruktur penyimpanan, dan akses pasar.

Keterbukaan tetap diperlukan dalam sektor pangan, terutama untuk teknologi benih, mekanisasi, irigasi cerdas, digital farming, pembiayaan, dan perdagangan. Tetapi kedaulatan diperlukan agar petani tidak menjadi pihak paling lemah dalam rantai nilai. Petani perlu memperoleh akses tanah yang jelas, harga yang adil, pembiayaan murah, asuransi pertanian, informasi cuaca, dan akses pasar digital.

Ekonomi masa depan yang berdaulat tidak boleh mengorbankan petani atas nama efisiensi. Petani harus menjadi pelaku produktif, bukan sekadar penerima bantuan. Kedaulatan pangan yang sehat adalah ketika petani sejahtera, konsumen memperoleh pangan terjangkau, lingkungan terjaga, dan negara mampu menghadapi guncangan global.

8. Kedaulatan Energi dan Transisi Hijau

Energi adalah fondasi ekonomi. Industri, transportasi, rumah tangga, digitalisasi, pertanian modern, dan layanan publik membutuhkan energi yang andal dan terjangkau. Namun sistem energi global sedang berubah.

Dunia bergerak menuju transisi energi rendah karbon, meskipun laju dan arah transisi berbeda antarnegara. Bagi Indonesia, transisi energi bukan hanya agenda lingkungan, tetapi juga agenda kedaulatan ekonomi.

Indonesia masih memiliki ketergantungan besar pada energi fosil, terutama batu bara dalam pembangkitan listrik. Batu bara selama ini memberikan keuntungan ekspor, penerimaan negara, dan pasokan listrik murah. Namun dalam jangka panjang, ketergantungan pada batu bara dapat menjadi risiko karena standar karbon global, tekanan investor, dan perubahan teknologi energi.

OECD menyoroti bahwa biaya energi dan subsidi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi prospek ekonomi Indonesia. OECD juga menekankan perlunya efisiensi subsidi dan percepatan energi terbarukan untuk memperkuat keamanan energi. ([OECD](#)) Ini berarti transisi energi harus dikaitkan dengan stabilitas fiskal dan daya saing industri.

Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar: panas bumi, surya, hidro, bioenergi, angin, dan energi laut. Namun potensi tidak sama dengan realisasi. Diperlukan investasi, regulasi yang jelas, tarif yang menarik, jaringan transmisi, penyimpanan energi, pembiayaan hijau, dan kemampuan teknologi domestik.

Transisi energi juga harus adil. Daerah penghasil batu bara tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Pekerja di sektor fosil membutuhkan pelatihan ulang. Pemerintah daerah memerlukan strategi diversifikasi ekonomi. Masyarakat miskin harus dilindungi dari kenaikan harga energi. Inilah yang disebut **just energy transition**: transisi yang tidak hanya hijau, tetapi juga adil.

9. Kedaulatan Digital, Data, dan AI

Ekonomi masa depan akan semakin ditentukan oleh data, AI, cloud computing, keamanan siber, dan platform digital. Negara yang menguasai

data dan kemampuan AI akan memiliki keunggulan produktivitas. Negara yang hanya menjadi pengguna teknologi akan bergantung pada platform, algoritma, dan infrastruktur asing.

Indonesia memiliki pasar digital besar. E-commerce, fintech, transportasi daring, layanan pembayaran, pendidikan digital, telemedicine, dan administrasi publik digital berkembang pesat. Namun dominasi platform besar, ketimpangan akses internet, rendahnya literasi digital, dan lemahnya tata kelola data menjadi tantangan.

Kedaulatan digital bukan berarti melarang platform asing. Kedaulatan digital berarti negara memiliki aturan, kapasitas, dan infrastruktur untuk melindungi data warga, menjaga keamanan siber, mengembangkan talenta digital, memastikan persaingan sehat, dan menggunakan teknologi untuk kepentingan publik.

AI dapat meningkatkan produktivitas Indonesia dalam banyak sektor. Dalam pertanian, AI dapat membantu prediksi cuaca dan deteksi hama. Dalam kesehatan, AI dapat membantu diagnosis awal dan manajemen layanan. Dalam pendidikan, AI dapat mendukung pembelajaran adaptif. Dalam logistik, AI dapat mengoptimalkan rute dan stok. Dalam pemerintahan, AI dapat mempercepat layanan publik dan mendeteksi penyimpangan.

Namun AI juga membawa risiko ketimpangan. Perusahaan besar lebih mudah mengadopsi AI daripada UMKM. Kota besar lebih siap daripada daerah terpencil. Pekerja berpendidikan tinggi lebih mudah beradaptasi daripada pekerja rutin. Karena itu, strategi AI Indonesia harus inklusif: pelatihan digital, akses internet merata, dukungan UMKM, perlindungan pekerja, dan etika AI.

Acemoglu dan Restrepo menjelaskan bahwa teknologi otomatisasi dapat menggantikan tugas manusia, tetapi juga dapat menciptakan tugas baru bila institusi dan kebijakan mampu mengarahkan inovasi secara produktif. DOI: 10.1257/jep.33.2.3. Bagi Indonesia, kuncinya bukan menolak AI,

melainkan memastikan AI menciptakan pekerjaan baru, meningkatkan produktivitas, dan tidak memperlebar ketimpangan.

10. Rantai Nilai Global dan Naik Kelas Industri

Dalam ekonomi global, nilai tambah terbesar tidak selalu berada pada produksi fisik. Nilai tambah tinggi sering berada pada riset, desain, merek, teknologi, logistik, perangkat lunak, data, dan layanan. Karena itu, Indonesia tidak cukup masuk ke rantai nilai global; Indonesia harus naik posisi dalam rantai nilai tersebut.

Gereffi, Humphrey, dan Sturgeon menjelaskan bahwa rantai nilai global dikendalikan oleh pola tata kelola yang berbeda-beda, mulai dari pasar terbuka hingga jaringan yang sangat dikendalikan oleh perusahaan utama. DOI: 10.1080/09692290500049805. Negara berkembang harus memahami struktur tata kelola ini agar tidak terjebak sebagai pemasok bernilai rendah.

Indonesia perlu membangun strategi naik kelas industri melalui beberapa jalur.

Pertama, memperkuat pemasok lokal. Investasi asing harus dihubungkan dengan perusahaan domestik. Tanpa pemasok lokal, nilai tambah domestik rendah.

Kedua, memperkuat standardisasi dan sertifikasi. Produk Indonesia harus memenuhi standar kualitas, keamanan, lingkungan, dan traceability.

Ketiga, memperkuat riset dan desain. Industri tidak boleh hanya merakit atau mengolah. Indonesia harus membangun kemampuan rekayasa, desain produk, dan inovasi.

Keempat, memperkuat SDM industri. Pendidikan vokasi dan politeknik harus terhubung dengan kebutuhan sektor prioritas.

Kelima, membangun ekosistem industri. Kawasan industri harus menjadi ekosistem pembelajaran, bukan sekadar kumpulan pabrik.

Keenam, memperluas ekspor jasa modern. Ekonomi masa depan tidak hanya barang. Jasa digital, pendidikan, kesehatan, pariwisata berkualitas, desain, animasi, software, dan konsultasi dapat menjadi sumber ekspor baru.

11. Standar Global, ESG, dan Tantangan Komoditas Indonesia

Globalisasi baru ditandai oleh meningkatnya standar lingkungan dan sosial. Produk yang masuk pasar global harus memenuhi persyaratan deforestasi, emisi karbon, hak pekerja, keamanan pangan, dan keterlacakan. Ini sangat relevan bagi Indonesia karena ekspor sawit, kopi, kakao, karet, kayu, dan produk pertanian menghadapi tuntutan standar yang semakin ketat.

Regulasi deforestasi Uni Eropa atau EUDR menetapkan bahwa operator besar dan menengah mulai wajib mematuhi ketentuan pada 30 Desember 2026, sedangkan operator mikro dan kecil pada 30 Juni 2027.

([Environment](#)) Regulasi ini berdampak pada komoditas seperti sawit, kopi, kakao, karet, kayu, sapi, kedelai, dan produk turunannya. Bagi Indonesia, EUDR menjadi tantangan serius karena jutaan petani kecil terlibat dalam komoditas ekspor.

Standar global dapat dipandang sebagai hambatan non-tarif, tetapi juga dapat menjadi pemicu modernisasi. Jika Indonesia mampu membangun sistem traceability, legalitas lahan, sertifikasi petani, perlindungan hutan, dan digitalisasi rantai pasok, maka produk Indonesia dapat memperoleh reputasi lebih kuat. Sebaliknya, bila Indonesia lambat, petani kecil dapat tersisih dari rantai pasok ekspor.

Reuters melaporkan bahwa EUDR berisiko menyingkirkan petani kecil dari rantai pasok jika mereka tidak memiliki sumber daya, infrastruktur digital, dan dokumen lahan yang memadai. ([Reuters](#)) Ini penting bagi Indonesia karena keberlanjutan tidak boleh hanya menjadi beban administratif bagi petani kecil. Negara perlu hadir melalui pendampingan, pembiayaan, data lahan, sertifikasi kolektif, koperasi modern, dan diplomasi perdagangan.

Kedaulatan dalam konteks standar global berarti Indonesia tidak sekadar menolak standar, tetapi juga ikut membentuk standar dan memperjuangkan keadilan implementasi. Keterbukaan berarti Indonesia bersedia memenuhi standar pasar global. Sintesisnya adalah memperkuat kapasitas domestik agar standar global menjadi peluang peningkatan kualitas, bukan alat eksklusif.

12. UMKM sebagai Basis Kedaulatan Ekonomi Rakyat

UMKM adalah basis sosial ekonomi Indonesia. Namun UMKM sering berada pada produktivitas rendah, teknologi terbatas, akses modal lemah, pemasaran terbatas, dan manajemen sederhana. Dalam ekonomi masa depan, UMKM harus naik kelas. Jika tidak, globalisasi dan digitalisasi hanya akan menguntungkan perusahaan besar.

UMKM perlu ditempatkan dalam strategi keterbukaan berdaulat. Keterbukaan memberi UMKM akses pasar digital, ekspor, teknologi, desain, dan pembiayaan. Kedaulatan memastikan UMKM tidak ditinggalkan oleh kompetisi global dan tidak dimatikan oleh platform besar.

Strategi UMKM masa depan harus mencakup beberapa hal. Pertama, digitalisasi manajemen, bukan hanya pemasaran. UMKM perlu pencatatan keuangan, manajemen stok, pembayaran digital, analisis pelanggan, dan integrasi logistik. Kedua, pembiayaan produktif. Kredit harus dihubungkan dengan peningkatan kapasitas, bukan hanya konsumsi modal kerja. Ketiga, sertifikasi dan standarisasi. UMKM pangan, kerajinan, kosmetik, dan produk kreatif perlu standar kualitas agar bisa masuk pasar modern. Keempat, kemitraan rantai pasok. BUMN, korporasi besar, hotel, restoran, rumah sakit, sekolah, dan kawasan industri dapat menjadi pembeli produk UMKM. Kelima, koperasi modern. Banyak UMKM terlalu kecil untuk bersaing sendiri; koperasi dapat menjadi instrumen agregasi produksi, pembelian bahan baku, sertifikasi, dan pemasaran.

UMKM juga harus masuk dalam agenda ekonomi hijau. Produk lokal berkelanjutan, pangan sehat, ekonomi sirkular, pariwisata desa, kerajinan berbasis budaya, dan produk berbasis alam dapat memiliki nilai tambah tinggi bila dikemas secara modern.

13. Pendidikan, Riset, dan SDM Adaptif

Tidak ada kedaulatan ekonomi tanpa kedaulatan pengetahuan. Negara yang hanya membeli teknologi tidak akan pernah benar-benar berdaulat. Negara harus mampu memahami, mengadaptasi, memperbaiki, dan menciptakan teknologi. Karena itu, pendidikan dan riset adalah fondasi ekonomi masa depan.

Indonesia membutuhkan SDM adaptif. Dunia kerja berubah cepat karena AI, otomasi, transisi energi, ekonomi digital, dan standar global. Pekerjaan rutin akan semakin terotomatisasi. Pekerjaan masa depan membutuhkan kemampuan berpikir kritis, analitis, kreatif, kolaboratif, etis, dan digital.

Pendidikan harus berubah dari sekadar transfer pengetahuan menjadi pembentukan kapabilitas. Sekolah perlu memperkuat literasi, numerasi, sains, karakter, dan kemampuan belajar sepanjang hayat. Pendidikan vokasi harus terhubung dengan industri. Perguruan tinggi harus memperkuat riset terapan, kolaborasi industri, kewirausahaan teknologi, dan publikasi ilmiah yang berdampak.

Riset harus diarahkan pada masalah strategis nasional: pangan, energi, kesehatan, biodiversitas, AI, material, maritim, kebencanaan, iklim, dan tata kelola publik. Indonesia memiliki kekayaan hayati dan geografis yang dapat menjadi basis riset unik. Tetapi riset membutuhkan pendanaan, laboratorium, talenta, jejaring internasional, dan budaya ilmiah.

Keterbukaan akademik penting karena ilmu pengetahuan berkembang secara global. Namun kedaulatan pengetahuan berarti Indonesia tidak

hanya menjadi pengguna teori dan teknologi luar, tetapi juga produsen pengetahuan yang relevan dengan konteks Nusantara.

14. Peran Negara: Dari Pengatur ke Arsitek Ekosistem

Dalam ekonomi masa depan, negara tidak cukup menjadi regulator pasif. Negara harus menjadi arsitek ekosistem. Artinya, negara membantu menyusun arah pembangunan, menciptakan insentif, memperbaiki koordinasi, menyediakan barang publik, melindungi kelompok rentan, dan membangun kapasitas nasional. Namun negara juga harus menghindari jebakan birokratisme, korupsi, dan politisasi ekonomi.

Negara perlu hadir dalam beberapa fungsi.

Pertama, sebagai pembuat arah. Negara harus menentukan sektor prioritas berdasarkan potensi nasional dan tren global.

Kedua, sebagai penyedia barang publik. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, riset, data, keamanan, dan hukum adalah fondasi yang tidak dapat sepenuhnya disediakan pasar.

Ketiga, sebagai pengoreksi kegagalan pasar. Pasar sering gagal membiayai riset jangka panjang, melindungi lingkungan, atau melayani wilayah terpencil.

Keempat, sebagai penjaga persaingan sehat. Negara harus mencegah monopoli, kartel, dan dominasi platform yang merugikan konsumen dan UMKM.

Kelima, sebagai pelindung rakyat. Transformasi ekonomi menciptakan pemenang dan pihak yang tertinggal; negara harus menyediakan perlindungan sosial dan pelatihan ulang.

Namun negara yang kuat harus akuntabel. Negara tidak boleh menjadi alat rente. Kebijakan industri harus transparan. Insentif harus berbasis kinerja.

BUMN harus profesional. Proyek strategis harus dievaluasi. Publik harus dapat mengawasi.

15. Stabilitas Makroekonomi dan Ruang Fiskal

Keterbukaan dan kedaulatan membutuhkan stabilitas makroekonomi. Tanpa stabilitas, investor ragu, masyarakat kehilangan daya beli, dan negara kehilangan ruang kebijakan. Stabilitas rupiah, inflasi terkendali, defisit fiskal sehat, dan sistem keuangan kuat adalah prasyarat transformasi.

Namun stabilitas tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari investasi masa depan. Negara perlu berbelanja untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, riset, digitalisasi, dan transisi energi. Tantangannya adalah membedakan belanja produktif dan belanja tidak produktif.

Belanja produktif meningkatkan kapasitas jangka panjang. Contohnya pendidikan dasar, vokasi, sanitasi, kesehatan ibu-anak, infrastruktur logistik, jaringan internet, energi bersih, irigasi, riset, dan reformasi birokrasi. Belanja tidak produktif hanya memberi dampak jangka pendek tanpa meningkatkan produktivitas.

OECD menyoroti bahwa tekanan biaya energi dan subsidi dapat memengaruhi konsumsi, investasi, dan prospek pertumbuhan Indonesia. ([OECD](#)) Maka, reformasi subsidi perlu dilakukan secara hati-hati: lebih tepat sasaran, melindungi kelompok rentan, dan memberi ruang bagi investasi produktif.

Kedaulatan fiskal berarti negara memiliki kemampuan membiayai prioritas nasional tanpa ketergantungan berlebihan pada utang mahal atau pembiayaan jangka pendek. Ini membutuhkan reformasi perpajakan, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, efisiensi belanja, dan pemberantasan kebocoran.

16. ASEAN dan Indo-Pasifik sebagai Ruang Strategis

Indonesia tidak dapat mempersiapkan ekonomi masa depan sendirian. ASEAN adalah ruang strategis paling dekat. Dalam globalisasi baru, kawasan menjadi penting karena perusahaan mencari rantai pasok yang lebih aman dan terdiversifikasi. ASEAN dapat menjadi basis produksi, pasar, dan diplomasi ekonomi.

FDI ke ASEAN yang tetap kuat menunjukkan bahwa kawasan ini semakin menarik dalam perubahan rantai pasok global. ([ASEAN Main Portal](#)) Indonesia harus memanfaatkan momentum ini, bukan hanya sebagai penerima investasi, tetapi sebagai pemimpin kawasan.

Indonesia dapat memperkuat peran ASEAN dalam beberapa agenda: integrasi perdagangan, pembayaran digital lintas negara, ketahanan pangan kawasan, jaringan energi ASEAN, standar keberlanjutan, mobilitas talenta, dan diplomasi menghadapi proteksionisme global. Jika ASEAN kuat, posisi tawar Indonesia juga kuat.

Di Indo-Pasifik, Indonesia harus menjaga posisi bebas aktif. Indonesia perlu bekerja sama dengan Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa, India, Australia, Timur Tengah, dan Afrika, tanpa menjadi satelit ekonomi salah satu kekuatan. Kedaulatan diplomasi ekonomi berarti kemampuan menjaga diversifikasi mitra.

17. Inklusi: Agar Ekonomi Masa Depan Tidak Meninggalkan Rakyat

Pertumbuhan ekonomi tidak otomatis inklusif. Ekonomi digital dapat memperkaya pemilik platform tetapi menekan pekerja informal. Hilirisasi dapat meningkatkan ekspor tetapi belum tentu menyejahterakan masyarakat lokal. Investasi asing dapat meningkatkan PDB tetapi tidak selalu menciptakan pekerjaan berkualitas. Karena itu, inklusi harus menjadi desain awal, bukan tambahan setelah pertumbuhan terjadi.

Pihak yang harus menjadi pusat inklusi adalah petani, nelayan, pekerja informal, UMKM, perempuan, generasi muda, masyarakat adat, daerah tertinggal, dan Indonesia Timur. Kedaulatan ekonomi tidak berarti banyak bila rakyat kecil tetap rentan.

Inklusi ekonomi membutuhkan akses. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, internet, pembiayaan, pasar, tanah, perlindungan sosial, hukum, dan informasi. Inklusi juga membutuhkan representasi. Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam proyek tambang, kawasan industri, infrastruktur, dan konservasi lingkungan.

Ekonomi masa depan yang inklusif harus mengukur keberhasilan bukan hanya dari PDB, tetapi juga kualitas pekerjaan, distribusi pendapatan, mobilitas sosial, kualitas lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan rasa aman masyarakat.

18. Skenario Masa Depan Indonesia

Ada tiga skenario besar bagi Indonesia.

18.1 Skenario Keterbukaan Berdaulat

Dalam skenario ini, Indonesia berhasil memadukan keterbukaan dan kedaulatan. Investasi asing masuk dengan transfer teknologi. Hilirisasi berkembang menjadi industrialisasi. UMKM naik kelas. AI digunakan untuk produktivitas publik. Energi terbarukan tumbuh. Pendidikan dan vokasi membaik. Tata kelola transparan. Indonesia menjadi kekuatan ekonomi yang kompetitif, inklusif, dan berdaulat.

18.2 Skenario Keterbukaan Pasif

Dalam skenario ini, Indonesia tetap terbuka, tetapi tidak memiliki strategi kuat. Investasi masuk, tetapi nilai tambah domestik rendah. Ekspor tumbuh, tetapi berbasis komoditas. Digitalisasi berkembang, tetapi dikuasai platform besar. UMKM sulit naik kelas. Indonesia menjadi pasar besar, tetapi bukan pusat inovasi.

18.3 Skenario Kedaulatan Semu

Dalam skenario ini, negara mengatasnamakan kedaulatan, tetapi kebijakan digunakan untuk melindungi rente dan elite. Proteksi tidak menghasilkan produktivitas. BUMN dipolitisasi. Investasi menurun karena ketidakpastian. Hilirisasi menjadi proyek ekstraktif. Masyarakat lokal dan lingkungan dirugikan. Ini adalah skenario yang harus dihindari.

19. Agenda Kebijakan Strategis

Untuk menyiapkan Indonesia bagi ekonomi masa depan, beberapa agenda perlu diprioritaskan.

Pertama, membangun peta jalan keterbukaan berdaulat. Pemerintah harus menetapkan sektor prioritas berdasarkan nilai tambah, teknologi, lapangan kerja, ekspor, dan keberlanjutan.

Kedua, memperkuat hilirisasi berbasis teknologi. Hilirisasi harus disertai transfer teknologi, riset, pemasok lokal, dan standar lingkungan.

Ketiga, mempercepat reformasi pendidikan dan vokasi. SDM adaptif adalah fondasi ekonomi masa depan.

Keempat, membangun kedaulatan digital. Indonesia perlu memperkuat perlindungan data, keamanan siber, talenta AI, infrastruktur cloud, dan etika teknologi.

Kelima, memperkuat ketahanan pangan dan energi. Produksi domestik, diversifikasi, cadangan strategis, energi terbarukan, dan efisiensi subsidi harus menjadi prioritas.

Keenam, memperkuat UMKM dan koperasi modern. UMKM harus masuk rantai nilai nasional dan global.

Ketujuh, memperkuat tata kelola. Kepastian hukum, transparansi, anti-korupsi, persaingan sehat, dan evaluasi kebijakan harus menjadi inti pembangunan.

Kedelapan, memperkuat diplomasi ekonomi. Indonesia harus aktif membentuk aturan global, bukan hanya menerimanya.

Kesembilan, memastikan transisi yang adil. Pekerja, petani, nelayan, dan daerah rentan harus didampingi dalam perubahan ekonomi.

Kesepuluh, membangun indikator pembangunan masa depan. Keberhasilan harus diukur melalui produktivitas, inklusi, keberlanjutan, kualitas pekerjaan, dan kapabilitas manusia.

20. Penutup

Indonesia tidak dapat memilih antara terbuka atau berdaulat secara mutlak. Indonesia harus terbuka agar belajar, tumbuh, berdagang, berinovasi, dan bekerja sama. Tetapi Indonesia juga harus berdaulat agar tidak menjadi korban pasar global, dominasi teknologi, eksploitasi sumber daya, dan ketimpangan. Tantangan terbesar Indonesia bukan memilih salah satu, melainkan membangun sintesis yang cerdas: **keterbukaan berdaulat**.

Keterbukaan berdaulat menuntut negara yang cakap, masyarakat yang terdidik, pelaku usaha yang inovatif, UMKM yang naik kelas, industri yang produktif, teknologi yang manusiawi, dan tata kelola yang bersih. Ia menuntut pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memperkuat martabat manusia.

Ekonomi masa depan bukan hanya tentang angka. Ia tentang kemampuan bangsa untuk berdiri tegak di tengah dunia yang berubah. Ia tentang kemampuan mengubah kekayaan alam menjadi kesejahteraan, mengubah populasi besar menjadi SDM unggul, mengubah digitalisasi menjadi produktivitas, mengubah keterbukaan menjadi pembelajaran, dan mengubah kedaulatan menjadi kemakmuran rakyat.

Indonesia memiliki peluang besar. Tetapi peluang itu harus dikelola dengan visi, disiplin, dan integritas. Bila Indonesia mampu memadukan keterbukaan, kedaulatan, produktivitas, inklusi, dan keberlanjutan, maka

Indonesia bukan hanya akan bertahan dalam ekonomi masa depan, melainkan ikut membentuknya.

Glossarium

AI / Kecerdasan Buatan: Teknologi yang memungkinkan mesin melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti prediksi, pengenalan pola, pemrosesan bahasa, dan pengambilan keputusan.

ASEAN: Association of Southeast Asian Nations, organisasi regional Asia Tenggara yang menjadi ruang strategis bagi perdagangan, investasi, diplomasi, dan rantai pasok Indonesia.

De-risking: Strategi mengurangi risiko ketergantungan terhadap satu negara, pemasok, teknologi, atau pasar tertentu.

Digitalisasi inklusif: Transformasi digital yang memberi manfaat luas bagi masyarakat, termasuk UMKM, daerah tertinggal, pekerja, petani, dan layanan publik.

Ekonomi masa depan: Sistem ekonomi yang semakin ditentukan oleh teknologi, data, AI, energi bersih, produktivitas, inovasi, keberlanjutan, dan kualitas manusia.

ESG: Environmental, Social, and Governance; standar lingkungan, sosial, dan tata kelola yang semakin penting dalam investasi dan perdagangan global.

EUDR: European Union Deforestation Regulation, regulasi Uni Eropa yang mensyaratkan komoditas tertentu bebas dari deforestasi untuk masuk pasar Uni Eropa.

Friend-shoring: Pemindahan rantai pasok ke negara-negara yang dianggap sebagai mitra politik atau strategis yang lebih aman.

Globalisasi baru: Fase globalisasi yang ditandai oleh fragmentasi geopolitik, keamanan rantai pasok, digitalisasi, AI, transisi energi, dan standar keberlanjutan.

Hilirisasi: Proses meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan domestik sebelum dijual sebagai produk antara atau produk akhir.

Industrialisasi bernilai tambah: Pembangunan industri yang tidak hanya memproduksi barang, tetapi juga menguasai teknologi, desain, riset, pemasok lokal, dan pasar.

Kedaulatan data: Kemampuan negara mengatur, melindungi, dan memanfaatkan data nasional demi kepentingan publik.

Kedaulatan ekonomi: Kemampuan negara menentukan arah pembangunan, menjaga ruang kebijakan, melindungi sumber daya strategis, dan membangun kapasitas nasional.

Keterbukaan berdaulat: Strategi ekonomi yang tetap terbuka terhadap dunia, tetapi selektif, berorientasi nasional, dan memperkuat kapasitas domestik.

Ketahanan ekonomi: Kemampuan ekonomi bertahan, beradaptasi, dan pulih dari guncangan global maupun domestik.

Near-shoring: Pemindahan produksi ke negara yang lebih dekat dengan pasar utama.

Produktivitas: Kemampuan menghasilkan output lebih besar atau lebih bernilai dengan input yang sama atau lebih efisien.

Rantai nilai global: Jaringan produksi internasional yang membagi proses desain, produksi, distribusi, dan pemasaran ke berbagai negara.

Reshoring: Pemindahan kembali kegiatan produksi dari luar negeri ke negara asal perusahaan.

Sovereignty / Kedaulatan: Kemampuan mengambil keputusan strategis secara mandiri, dengan tetap mempertimbangkan kerja sama dan keterhubungan global.

Traceability: Kemampuan melacak asal-usul bahan baku, proses produksi, dan distribusi suatu produk dalam rantai pasok.

Transisi energi: Peralihan dari sistem energi berbasis fosil menuju energi rendah karbon dan terbarukan.

UMKM: Usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi basis penting ekonomi rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

(APA 7; DOI dicantumkan bila tersedia)

Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2019). Automation and new tasks: How technology displaces and reinstates labor. *Journal of Economic Perspectives*, 33(2), 3–30. <https://doi.org/10.1257/jep.33.2.3>

ASEAN Secretariat & UNCTAD. (2025). *ASEAN investment report 2025: Foreign direct investment and supply chain development*. DOI tidak tersedia.

Autor, D. H. (2015). Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation. *Journal of Economic Perspectives*, 29(3), 3–30. <https://doi.org/10.1257/jep.29.3.3>

Badan Pusat Statistik. (2026). *Exports and imports of Indonesia in April 2026 reached USD25.30 billion and USD25.21 billion, respectively*. DOI tidak tersedia.

Baldwin, R. (2016). *The great convergence: Information technology and the new globalization*. Harvard University Press. DOI tidak tersedia.

European Commission. (2026). *Regulation on deforestation-free products: Implementation*. DOI tidak tersedia.

Gereffi, G., Humphrey, J., & Sturgeon, T. (2005). The governance of global value chains. *Review of International Political Economy*, 12(1), 78–104. <https://doi.org/10.1080/09692290500049805>

Hausmann, R., Hwang, J., & Rodrik, D. (2007). What you export matters. *Journal of Economic Growth*, 12, 1–25. <https://doi.org/10.1007/s10887-006-9009-4>

Hidalgo, C. A., & Hausmann, R. (2009). The building blocks of economic complexity. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(26), 10570–10575. <https://doi.org/10.1073/pnas.0900943106>

International Energy Agency. (2025). *Global critical minerals outlook 2025*. DOI tidak tersedia.

International Monetary Fund. (2026). *Indonesia and the IMF: Country data*. DOI tidak tersedia.

Mazzucato, M. (2013). *The entrepreneurial state: Debunking public vs. private sector myths*. Anthem Press. DOI tidak tersedia.

North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press. DOI tidak tersedia.

OECD. (2026). *Indonesia: OECD economic outlook, volume 2026 issue 1*. DOI tidak tersedia.

Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press. DOI tidak tersedia.

Rodrik, D. (2011). *The globalization paradox: Democracy and the future of the world economy*. W. W. Norton. DOI tidak tersedia.

Rodrik, D. (2016). Premature deindustrialization. *Journal of Economic Growth*, 21, 1–33. <https://doi.org/10.1007/s10887-015-9122-3>

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press. DOI tidak tersedia.

Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its discontents*. W. W. Norton. DOI tidak tersedia.

World Bank. (2026). *Indonesia economic prospects*. DOI tidak tersedia.

World Trade Organization. (2026). *Global trade outlook and statistics: March 2026*. DOI tidak tersedia.

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 25 June 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#)). <https://chatgpt.com/c/6a3cfdaa-6f30-83ec-b9bf-4f7011c76d65>